

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN DI DESA TANJUNG BATU KECIL
KECAMATAN BURU KABUPATEN KARIMUN
PROPINSI KEPULAUAN RIAU**

Mitrayati¹, Deska Zulkarnain²

^{1,2}Universitas Karimun, Jalan Canggai Puteri Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun
email: mitrayati62@gmail.com¹), deskaalhaqi@gmail.com²)

Abstract

One of the success of village development is influenced by the role of the Village Head, thus the role of the Village Head becomes very important in the village development process in order to facilitate development and increase community awareness to participate in village development in relation to the Tanjung Batu Kecil Village, Buru District, Based on the results of the initial survey, the researchers found phenomena that: first, until now there has been no concept / model of village development that can be an optimal solution in efforts to reduce poverty in the village. Second, the village development that is carried out is sectoral, which will only provide partial solutions as well and with a temporary time, so there is no guarantee of the continuity of the development program. Third, the human resources in the village, both the apparatus and the community, have contributed greatly to the slowing of various efforts to implement village development itself, limited funding sources. The type of research used is qualitative descriptive research type. The details of the informants used in this research are as follows: Village Head 1 person, Village Secretary and Village Apparatus 4 people, Head Guard 2 people. The role of the village head as a mobilizer is the village head to move or invite the community to jointly take concrete actions to develop the village. In increasing public awareness to participate in an activity, there are various ways in which the village government has done all this in order to expedite the implementation of development in the Village and so that the residents of Tanjung Batu Kecil Village are accustomed to positive village activities.

Keywords: *The Role of Village Heads in Village Development*

Abstrak

Keberhasilan pembangunan desa salah satunya dipengaruhi oleh peran Kepala Desa, dengan demikian maka perannya Kepala Desa menjadi penting yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan desa guna untuk memperlancar pembangunan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa dalam kaitannya dengan Desa Tanjung Batu Kecil Kecamatan Buru, berdasarkan hasil survey awal peneliti menemukan fenomena-fenomena bahwa: pertama, sampai saat ini belum ada konsep/model pembangunan desa yang dapat menjadi solusi secara optimal dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa. Kedua, pembangunan desa yang dilaksanakan bersifat sektoral, yang hanya akan memberikan solusi secara parsial juga dan dengan waktu yang bersifat temporer, sehingga tidak ada jaminan kelangsungan program pembangunan tersebut. Ketiga, sumberdaya manusia di desa, baik aparat maupun masyarakatnya memberikan kontribusi besar terhadap melambatnya berbagai upaya pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri, keterbatasan sumber pendanaan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian Deskriptif kualitatif . adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepala Desa 1 orang , Sekretaris Desa dan Aparat Desa 4 orang, Kepala Dusun 2 orang,. Peran kepala Desa sebagai mobilisator Yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan ada berbagai cara yang di lakukan pemerintah Desa semua

itu di lakukan guna memperlancar pelaksanaan pembangunan di Desa dan agar warga Desa Tanjung Batu Kecil terbiasa akan kegiatan-kegiatan desa yang bersifat positif.

Kata Kunci: Peran Kepala Desa, Dalam Pembangunan Desa

PENDAHULUAN

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggara desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa), perangkat desa tersebut bertugas untuk membangun desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa pada umumnya penyelenggaraan pembangunan desa merupakan manifestasi sistem demokrasi di tingkat desa sehingga proses penyelenggaraannya dilaksanakan atas dasar prinsip “dari, oleh, dan untuk rakyat”. Hal ini dapat dilihat pada proses pemilihan kepala desa, proses pengangkatan perangkat desa, pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam proses pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 mengacu pada dua pola pendekatan yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan Desa Tanjung Batu Kecil Kecamatan Buru, berdasarkan hasil survey awal penulis menemukan fenomena-fenomena bahwa: pertama, sampai saat ini belum ada konsep/model pembangunan desa yang dapat menjadi solusi secara optimal dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa.

Kedua, pembangunan desa yang dilaksanakan bersifat sektoral, yang hanya akan memberikan solusi secara parsial juga dan dengan waktu yang bersifat temporer, sehingga tidak ada jaminan kelangsungan program pembangunan tersebut.

Ketiga, sumberdaya manusia di desa, baik aparat maupun masyarakatnya memberikan kontribusi besar terhadap melambatnya berbagai upaya pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri, keterbatasan sumber pendanaan, baik dari desa maupun dari Kabupaten, Provinsi dan Nasional, merupakan faktor utama lain yang menyebabkan lambatnya proses pembangunan desa. Disisi lain Anggaran yang disediakan/dialokasikan ke desa, baik dari Kabupaten, Provinsi maupun dari Nasional, cenderung bersifat proyek yaitu hanya bersifat sesaat dan berdampak pada golongan tertentu saja di desa. Keempat, perencanaan yang disusun, walaupun telah melalui suatu proses yang panjang, tetap tidak menunjukkan suatu *streamline* yang jelas serta tidak menunjukan keterpaduan program, bahkan pada kebanyakan kasus perencanaan.

Belum terlihat adanya suatu pemahaman yang menunjukkan bahwa desa sebagai sumber utama pembangunan Nasional, sehingga desa patut menjadi sasaran utama pembangunan dan harus ditempatkan sebagai partner utama dalam sistem pembangunan Nasional. Persoalan ketidakjelasan kewenangan yang ada di Pemerintah Kabupaten, menyebabkan terdapatnya berbagai kesulitan dalam menyusun dan mengimplementasi kebijakan Pemerintah desa terhadap upaya Pembangunan desa hal ini dapat dibuktikan dengan belum diterbitkannya peraturan daerah Kabupaten Karimun yang mengatur khusus tentang pelaksanaan pembangunan di desa yang acuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

1. Konsep Dan Teori Peran

Hermansyah (2015) Permerintahan Integratif, Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa yaitu sebagai fasilitator, sebagai mediator, sebagai motivator, dan sebagai mobilisator.

1) Peran Kepala Desa Sebagai Motivator

Pentingnya peranan motivator dalam proses pembangunan desa dan perlu dipahami oleh pemerintah desa dalam hal ini adalah Kepala Desa agar dapat melakukan berbagai bentuk tindakan atau bantuan kepada masyarakat desa setempat. Kepala Desa sebagai motivator harus mampu memotivasi warga untuk aktif serta dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan yang ingin dicapai nantinya dapat terlaksana dengan baik tanpa ada perselisihan diantara pemerintah desa masyarakat setempat, sebagai Kepala Desa harus mampu memberikan dorongan terhadap masyarakat aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sehingga nantinya mencapai tujuan tertentu guna memenuhi atau memuaskan suatu kebutuhan masyarakat desa dalam meningkatkan pembangunan desa.

Sebagai Kepala Pemerintah desa dalam hal ini sebagai motivator telah bekerja sama dengan masyarakat dalam hal ini yaitu bersama-sama dalam meningkatkan pembangunan desa dengan cara memberikan dorongan-dorongan kepada warga, di sini dapat dilihat bahwa dorongan dari Kepala Desa selalu dilakukan dengan tujuan bahwa hal tersebut memberikan kesadaran kepada masyarakat desa khususnya Desa Tanjung Batu Kecil akan pentingnya kerja sama dalam sebuah proses pembangunan.

2) Peran Kepala Desa Sebagai Mediator

Peran kepala desa sebagai mediator adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan (win-win solution).

3) Peran Kepala Desa Sebagai Fasilitator

Peran kepala desa sebagai fasilitator, bahwa kepala desa menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam hal memfasilitasi atau melengkapi kebutuhan, sarana dan prasarana yang mendukung proses pemerintahan dan pembangunan desa. Fasilitator juga dapat di katakan sebagai seorang

melakukan fasilitas, yakni membantu mengelola suatu proses pertukaran informasi, memperlancar komunikasi, dan memecahkan masalah bersama-sama.

Fasilitator bukanlah seseorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan nasihat atau pendapat. Fasilitator harus menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan.

Kepala Desa sebagai fasilitator desa merupakan pendamping masyarakat dalam pelaksanaan serta meningkatkan program-program pembangunan desa, artinya seorang fasilitator harus mampu menyediakan dan siap dengan informasi termasuk pendukungnya..

4) Peran Kepala Desa Sebagai Mobilisator

Mengenai peran Kepala Desa, dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya adalah sebagai perencana pembangunan, Kepala Desa sebagai penggerak, pengawas pembangunan, pelopor pembangunan, dan peran Kepala Desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD). Hal ini berarti bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin di desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab di dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga Kepala Desa bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

METODE PENELITIAN

Sesuai tempat studi dilakukannya penelitian ini yakni pada Kantor Desa Tanjung Batu Kecil Kecamatan Buru Kabupaten Karimun, maka Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa 1 orang
2. Sekretaris Desa dan Aparat Desa 4 orang
3. Tokoh dan Warga Masyarakat 2 Orang

Di dalam penelitian ini untuk menganalisis data dikumpulkan digunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder selanjutnya disusun, dianalisis, diimplementasikan untuk kemudian dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang diteliti. Pengambilan keputusan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu dari data dan fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus itu digeneralisasikan atau dianalisis ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Tanjung Batu Kecil Kecamatan Buru Kabupaten Karimun

Hermansyah (2015) Permerintahan Integratif, Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu sebagai fasilitator, sebagai mediator, sebagai motivator, dan sebagai mobilisator.

1) Peran Kepala Desa Sebagai Fasilitator

Kepala Desa telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik untuk memimpin pemerintahan Desa Tanjung Batu Kecil dalam mewujudkan pembangunan yang berkesianambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan pembangunan Kepala Desa berperan sebagai fasilitator untuk melaksanakannya karena pelaksanaan pembangunan merupakan tugas dari kepala desa yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kasi Pemerintahan Suspto, S.Si mengatakan bahwasanya “Pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung Batu Kecil ini sudah cukup dirasakan oleh masyarakat baik itu pembangunan fisik. Peran Kepala Desa dalam pembangunan sebagai fasilitator adalah tindakan Kepala Desa dalam menyediakan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembangunan secara bertanggung jawab secara fisik sehingga memudahkan aktivitas yang berlangsung didalam kehidupan masyarakat Desa Tanjung Batu kecil.” Peran Kepala Desa sebagai fasilitator, bahwa kepala Desa dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam hal memfasilitasi atau melengkapi kebutuhan yang di perlukan dalam proses pembangunan, misalnya memberikan alat-alat seperlunya untuk kegiatan pemangunan fisik seperti perbaikan jalan. Pada sebagian besar masyarakat pada Desa Tanjung Batu Kecil.”memandang atau menilai kepemimpinan Kepala Desa sudah berjalan cukup baik.

2) Peran Kepala Desa Sebagai Mediator

Peran Kepala Desa sebagai mediator di pemerintahan desa ini sudah cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan salah seorang Kepala Dusun 1 Bapak Nofrial mengatakan bahwasanya “pada waktu Kepala Desa menyelesaikan konflik antara masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembangunan. Terkadang permasalahan yang diselesaikan oleh Kepala Desa tidak ada dukungan dari masyarakat sehingga permasalahan tersebut harus dibawa keranah hukum baik itu Hukum Adat dan Hukum Negara.” Tindakan Kepala Desa Desa Tanjung Batu Kecil ini dalam menyelesaikan masalah atau konflik didalam masyarakat tindak terlepas dengan perundang-undang yang berlaku khususnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sesuai dengan tugas dan fungsi kepala desa. Dalam menyelesaikan sesuatu masalah apabila dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab didukung dengan komponen-komponen lain, misalnya ada dukungan dari masyarakat, sarana dan prasarana, kondisi yang kondusif dan lingkungan yang memungkinkan, maka pembangunan desa yang diprogramkan oleh pemerintah dan yang diharapkan oleh masyarakat akan berjalan secara efektif, efisien serta maksimal. Oleh sebab itu kalau dukungan tersebut sudah memadai, maka harus terjalin hubungan yang harmonis antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) atau yang diidentikkan sebagai badan perwakilan masyarakat yang berada di tingkat desa. Kepala desa sebagai pemegang jabatan tertinggi di tingkat desa harus memainkan peranan secara maksimal, agar program yang direncanakan dapat berjalan dengan optimal.

3) Peran Kepala Desa Sebagai Motivator

Kepala Desa Sebagai motivator adalah seseorang yang memberikan motivasi untuk mencapai suatu tujuan agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai yang di harapkan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kaur tata Usaha dan Umum Ibu Irma mengatakan bahwasanya “Kepala Desa selalu memberi motivasi serta masukan-masukan dan dukungan dengan memberi semangat kepada aparatur pemerintah di kantor desa, selain dari pada itu kepala desa adalah seorang pemimpin yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi kepada masyarakat desa, misalnya memotivasi warga untuk memelihara prasarana fisik seperti jalan, gorong-gorong, jembatan dll.”

Pentingnya peranan motivafator dalam proses pembangunan desa dan perlu dipahami oleh pemerintah desa dalam hal ini adalah Kepala Desa di Desa Tanjung Batu Kecil agar dapat melakukan berbagai bentuk tindakan atau bantuan kepada masyarakat setempat. Kepala Desa sebagai Motivator harus mampu memotivasi warga untuk aktif serta dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan sehingga pembangunan yang ingin dicapai nantinya dapat terlaksana dengan baik tanpa ada perselisihan diantara pemerintahan desa dan masyarakat setempat, sebagai kepala Kepala Desa harus mampu memberikan dorongan terhadap masyarakat untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sehingga nantinya mencapai tujuan tertentu guna memenuhi/memuaskan suatu kebutuhan masyarakat desa dalam meningkatkan pembangunan desa.

Sebagai kepala pemerintahan desa dalam hal ini sebagai motivator telah bekerja sama dengan masyarakat dalam hal ini yaitu bersama-sama dalam meningkatkan pembangunan desa dengan cara memberikan dorongan kepada warga, disini dapat dilihat bahwa dorongan dari Kepala Desa selalu dilakukan dengan tujuan bahwa hal tersebut memberikan kesadaran kepada masyarakat desa khususnya masyarakat Desa Tanjung Batu Kecil akan pentingnya kerja sama dalam sebuah proses pembangunan.

Selain itu, dengan hal tersebut tentunya mendapat respon yang positif dari masyarakat Desa Tanjung Batu Kecil karena dorongan dan bimbingan dari Kepala Desa sangat di perlukan dan di nantikan oleh masyarakat desa.

Dalam suatu kelompok, motivasi sebagai penggerak kepada kejayaan organisasi. Motivasi memainkan peranan yang sangat penting dalam organisasi termasuk juga dalam organisasi pemerintahan. Dalam hal memotivasi atau memberikan semangat dari hasil penelitian ini warga Desa Tanjung Batu Kecil memandang atau menilai Peran Kepala Desa ini sudah berjalan dengan baik.

4) Peran Kepala Desa Sebagai Mobilisator

Peran Kepala Desa sebagai Mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, melakukan penanaman pohon jangka panjang, serta memperbaiki tempat umum lainnya.

Mengenai peran Kepala Desa, dalam hal melaksanakan pembangunan di wilayahnya adalah sesuai hasil wawancara peneliti dengan salah satu Kepala Dusun 2 Bapak Mukhtar mengatakan “sebagai perencana pembangunan,

Kepala Desa sebagai penggerak, pengawas pembangunan, dan pelopor pembangunan, dan peran Kepala Desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam anggaran pendapatan dan Belanja Desa.” Hal ini berarti bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab di dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Dari hasil rangkuman wawancara, peneliti dengan Kaur Perencanaan Bapak Khairul “diketahui bahwa di dalam urusan pembinaan masyarakat desa, kepala desa cukup berperan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa, terutama disektor ekonomi/pertanian tanaman pangan, sektor pendidikan, kesehatan dan adat-istiadat.”

Dengan kata lain, bahwa Pemerintah Desa, khususnya Kepala Desa yang berkemampuan dapat mendorong ketercapaian Pembangunan Desa dalam arti (1) mampu memperbaiki kondisi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat; (2) mampu meningkatkan partisipasi masyarakat; dan (3) mampu menumbuhkembangkan tingkat kemandirian masyarakat desa. Dengan demikian, jelaslah bahwa keterkaitan antara ketiga Sistem pendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa merupakan bagian dari faktor-faktor Sosial budaya yang menentukan tingkat Keberhasilan Pembangunan Desa yang merupakan kesimpulan teoritis sekaligus sebagai Kerangka berpikir dalam penelitian ini. Ketiga sistem pendukung kearah pencapaian tujuan pembangunan (desa) diatas saling terkait satu dengan lainnya dan memiliki fungsi serta peranan masing-masing. Dukungan Lingkungan memiliki fungsi yang paling mendasar sebagai pendukung atau penyangga utama berdirinya suatu sistem pemerintahan desa secara keseluruhan, Sementara dukungan struktur merupakan kerangka bangunan yang berdiri tegak diatas landasan dukungan lingkungan, sedangkan Pelaksanaan Tugas (*performance*) adalah motor penggerak pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan itu sendiri. Lemahnya ketiga sistem pendukung diatas berarti melemah pula kemampuan pemerintahan desa yang pada gilirannya akan menyeret sistem pemerintahan dan pembangunan desa secara keseluruhan sehingga menghambat pencapaian sasaran dan tujuan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas, berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Bapak Syahril, SE mengatakan bahwa: “secara kumulatif ketiga sistem pendukung pembangunan yang meliputi : dukungan lingkungan, dukungan struktur dan pelaksanaan tugas pemerintahan dapat memacu pencapaian tujuan atau bahkan menghambat pencapaian sasaran-sasaran Pembangunan Desa itu sendiri. Kepala Desa merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah desa. Oleh karena itu kepala desa beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di desa tergantung dari kinerja Kepala Desa dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta di dalam pembangunan. Sebagaimana pembangunan di desa, yang diatur dalam pasal 3 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa ditegaskan bahwa Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup

bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Syahril, SE bahwa “Kepala Desa sangat berperan, tetap melakukan pengawalan yang bijak demi terselenggaranya pembangunan yang intensif. Juga terus tingkatkan pelayanan yang baik kepada warga dan buka ruang yang sebebas-bebasnya kepada aspirasi masyarakat demi perkembangan desa.” Kemudian ditambahkan oleh Sekretaris Desa Tanjung Batu kecil Bapak Syaripudin yang mengatakan “Desa Tanjung Batu Kecil adalah desa yang penduduknya heterogen dimana memberikan tantangan tersendiri buat kami dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, untuk sektor pembangunan kami sebagai komponen pemerintah desa, hanya bisa mengusulkan berbagai pembangunan fisik, sementara pelaksanaannya tidak bisa kami pastikan karena semua tergantung dari dana atau anggaran yang diberikan untuk desa oleh pemerintah.” Kami hanya bisa mengawal, dalam artian hanya sebatas menunjukkan lokasi yang menjadi pelaksanaan pembangunan. Hal di atas menunjukkan peranan Kepala Desa dalam hal pembangunan fisik hanya bisa menjalankan perintah pengaturan keuangan/anggaran dari pemerintah tingkat atas. Kedudukan Kepala desa sebagai kepala pemerintahan dan pembangunan serta pemimpin formal masyarakat sangatlah penting di dalam kelancaran pembangunan sehingga mengharuskan Kepala Desa mempunyai aparatur yang ahli di bidangnya, sehingga program dan tugas pemerintah desa dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan Kepala desa dan aparatnya dengan caranya sendiri untuk bisa mempengaruhi atau membujuk masyarakatnya dalam peningkatan kesejahteraan. Sehingga masyarakat memperoleh berbagai manfaat di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

KESIMPULAN

Sesuai dengan tugas kepala desa sebagai fasilitator di masyarakat baik dalam hal yang positif dan negatif sudah cukup terlaksana dengan baik dan lancar. Masih ada saja terdapat kendala-kendala dalam hal pelaksanaannya. Peran kepemimpinan kepala desa sebagai mediator dalam menggerakkan masyarakat dalam rangka pembangunan fisik di Desa Tanjung Batu kecil sudah terlaksana cukup baik terlihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan dan hasil-hasil pembangunan fisik.

Peran kepemimpinan kepala desa sebagai motivator dalam menggerakkan partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk swadaya. Kegiatan yang dilakukan kepala desa dalam menjalankan perannya sebagai motivasi pembangunan serta aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan fisik di desa. Dalam menjalankan peran kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik masih terkendala dengan cara berkoordinasi antar aparatur, lembaga desa dan masyarakat, menghambat pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung Batu Kecil.

Kepala Desa seseorang yang memberikan motivasi untuk mencapai suatu tujuan agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai yang diharapkan. Kepala Desa sudah melaksanakan tugasnya sebagai motivator di mana Kepala Desa selalu memberikan motivasi serta masukan-masukan dan dukungan dengan memberi semangat kepada warga dan aparatur pemerintah di kantor desa, selain dari pada itu kepala desa adalah

seorang pemimpin yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi kepada masyarakat desa.

Peran kepala Desa sebagai mobilisator Yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan ada berbagai cara yang di lakukan pemerintah Desa semua itu di lakukan guna memperlancar pelaksanaan pembangunan di Desa dan agar warga Desa Tanjung Batu Kecil terbiasa akan kegiatan-kegiatan desa yang bersifat positif.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Widjaja, 1996, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (sebuah Tinjauan), Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Affandi & Setia Hadi. 1996. Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Jakarta: Majalah Prisma.
- Beratha, I. N. 1982. Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Masyarakat Desa. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Suharto, Edi. 2006. Membangaun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Refika Aditama. Bandung
- Tjokrowinoto, Moejiarto. 2007. Pembangunan Dilema dan Tantangan. Yokyakarta : Pustaka Pelajar
- Inu Kencana Syafiie (2011). Etika Pemerintahan. Rineka Cipta : Jakarta
- Labolo, Muhadam. 2007. Memahami Ilmu Pemerintahan: suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung: CV Alfabeta.
- Siagian, Sondang., P. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama). Jakarta: Binapura Aksara.
- Trijono, Lambang.2007.Pembangunan Sebagai Perdamaian, Yayasan Obor Indonesia :Jakarta.
- Daldjoeni, N. 1998. Geografi Kota dan Desa. Bandung : Penerbit Alumni ITB.
- Koentjaraningrat, 1991. Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta : Gramedia
- Referensi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang kewenangan desa
- Undang Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Referensi Website: <https://id.wikipedia.org/wiki/Desa>